

TANTANGAN DAN PELUANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DALAM Mendukung INOVASI PELAYANAN KEIMIGRASIAN

Muhammad Aqilla Syafa'atullah Baihaqi¹, Pelangi Almaresa², Francisco³,
Mochammad Rizqy Yovanza Fahlevi⁴, Juventino Gabriel Simanjuntak⁵, Nurul
Maharani Piranti⁶

aqillabaihaqi01@gmail.com¹, pelangialmaresa02@gmail.com², cikoc2004@gmail.com³,
124rizqyyovanza@gmail.com⁴, juvenjuntak116@gmail.com⁵, nurulpiranti20@gmail.com⁶

Polteknik Pengayoman Indonesia

ABSTRAK

Barang Milik Negara (BMN) merupakan aset penting yang mendukung layanan keimigrasian di Indonesia, sehingga pengelolaannya yang tepat menjadi kunci keberhasilan inovasi pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, dan ramah hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan menganalisis tantangan dan peluang pengelolaan BMN dalam mendukung inovasi pelayanan keimigrasian dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif berbasis data sekunder dari laporan resmi pemerintah dan sumber daring kredibel. Hasil penelitian menunjukkan adanya tantangan berupa ketidaksesuaian data aset, keterbatasan anggaran pemeliharaan, kapasitas SDM pengelola yang belum memadai, lemahnya koordinasi antarunit, dan kompleksitas regulasi, yang menghambat dukungan infrastruktur bagi inovasi layanan publik seperti autogate, aplikasi daring, dan layanan ramah kelompok rentan. Namun, terdapat peluang strategis melalui digitalisasi sistem pengelolaan aset, kerja sama antarunit dan kemitraan publik-swasta, serta peningkatan kapasitas teknis pegawai. Praktik baik di Kantor Imigrasi Palu, Kupang, dan Sampit membuktikan bahwa integrasi antara pengelolaan BMN dan inovasi layanan publik dapat meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan kualitas layanan keimigrasian. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan BMN yang transparan, terencana, dan adaptif merupakan fondasi penting untuk membangun layanan keimigrasian yang modern, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Kata Kunci: Barang Milik Negara, Pelayanan Keimigrasian, Inovasi Layanan Publik, Pengelolaan Aset, Digitalisasi Pelayanan.

ABSTRACT

State-Owned Assets (Barang Milik Negara/BMN) are essential resources that support immigration services in Indonesia, making their proper management a key factor in the success of public service innovation that is fast, accessible, transparent, and human rights-oriented. This study aims to analyze the challenges and opportunities in managing BMN to support innovation in immigration services using a qualitative descriptive approach based on secondary data from official government reports and credible online sources. The findings reveal challenges such as discrepancies between asset data and physical conditions, limited maintenance budgets, insufficient staff capacity, weak inter-unit coordination, and regulatory complexity, which hinder infrastructure support for innovations like autogates, online applications, and services for vulnerable groups. However, strategic opportunities exist through digitalized asset management systems, inter-unit collaboration, public-private partnerships, and capacity building for staff. Best practices at the Immigration Offices in Palu, Kupang, and Sampit demonstrate that integrating BMN management with public service innovation can improve accessibility, efficiency, and quality of immigration services. This study concludes that transparent, well-planned, and adaptive BMN management is a vital foundation for building modern, responsive, and community-oriented immigration services.

Keywords: State-Owned Assets, Immigration Services, Public Service Innovation, Asset Management, Service Digitalization.

PENDAHULUAN

Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, yang selanjutnya digunakan untuk mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah. Dalam konteks penyelenggaraan pelayanan publik, BMN memegang peranan yang sangat penting sebagai sarana dan prasarana yang menunjang kelancaran operasional, peningkatan kualitas pelayanan, serta terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai salah satu institusi di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki mandat strategis untuk memberikan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat, baik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA). Untuk itu, pengelolaan BMN yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan dalam mendukung inovasi pelayanan keimigrasian.

Dalam beberapa tahun terakhir, tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik semakin meningkat. Masyarakat mengharapkan pelayanan keimigrasian yang cepat, transparan, nyaman, dan berbasis teknologi informasi. Perkembangan teknologi serta kebijakan reformasi birokrasi juga mendorong perubahan paradigma pelayanan publik, termasuk layanan keimigrasian yang harus semakin adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis. Dalam kondisi ini, BMN berperan sebagai instrumen pendukung yang tidak hanya berfungsi sebagai aset negara, tetapi juga sebagai penggerak inovasi pelayanan melalui penyediaan sarana yang memadai, infrastruktur teknologi informasi, dan fasilitas pelayanan yang ramah terhadap kelompok rentan.

Meskipun memiliki potensi besar, pengelolaan BMN pada sektor keimigrasian tidak lepas dari berbagai tantangan. Tantangan tersebut antara lain keterbatasan anggaran pemeliharaan dan pengadaan, proses administrasi yang masih bersifat manual, kurangnya integrasi sistem informasi pengelolaan BMN, serta lemahnya koordinasi antarunit dalam proses inventarisasi dan pemanfaatan barang. Selain itu, sebagian BMN yang dimiliki instansi terkadang belum sesuai dengan kebutuhan lapangan, sehingga berdampak pada efektivitas layanan. Tantangan-tantangan ini berpotensi menghambat lahirnya inovasi pelayanan, seperti penerapan sistem antrean berbasis digital, pembangunan fasilitas pelayanan ramah difabel, atau pemanfaatan teknologi biometrik yang membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai.

Di sisi lain, era digitalisasi dan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara membuka peluang besar bagi optimalisasi BMN. Penerapan sistem informasi manajemen aset berbasis digital, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta peluang kerja sama dengan pihak swasta dalam bentuk skema kemitraan publik-swasta (Public Private Partnership) merupakan contoh strategi yang dapat mendorong efisiensi dan efektivitas pengelolaan BMN. Melalui pemanfaatan teknologi informasi, data aset negara dapat lebih mudah diakses dan dimonitor, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, peluang peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengelola BMN juga dapat dioptimalkan melalui pelatihan dan sertifikasi agar pengelolaan aset negara dapat dilakukan secara profesional dan sesuai dengan regulasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan dan peluang pengelolaan BMN dalam mendukung inovasi pelayanan keimigrasian di Indonesia. Dengan pemetaan yang jelas atas berbagai permasalahan dan potensi yang ada, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan bagi pengambil keputusan dan pelaksana teknis agar pengelolaan BMN lebih optimal, efisien, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan

demikian, pelayanan keimigrasian di Indonesia dapat terus bertransformasi menjadi layanan yang modern, responsif, dan sesuai dengan harapan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang berfokus pada analisis data sekunder untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai tantangan dan peluang pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dalam mendukung inovasi pelayanan keimigrasian. Pendekatan ini dipilih karena mampu menjelaskan fenomena secara rinci, menyajikan fakta secara sistematis, dan menggambarkan keterkaitan antara pengelolaan BMN dan inovasi layanan publik tanpa melakukan manipulasi variabel sebagaimana dalam penelitian eksperimental. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini dapat menelaah kondisi faktual pengelolaan BMN di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi melalui data yang tersedia secara daring (web) dan sumber-sumber resmi pemerintah.

Penelitian ini memanfaatkan desain studi kasus dengan memilih beberapa unit layanan keimigrasian yang telah menerapkan inovasi pelayanan publik dan memiliki data terbuka mengenai pengelolaan BMN. Studi kasus ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran nyata tentang praktik pengelolaan BMN yang mendukung penyelenggaraan pelayanan fasilitatif keimigrasian di lapangan. Lokasi penelitian dipilih secara purposif, yakni pada Kantor Imigrasi yang memiliki publikasi resmi mengenai inovasi pelayanan dan pengelolaan BMN, seperti Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palu dengan penerapan sistem digital SIMKIM dan MOLINA, Kantor Imigrasi Kupang dengan aplikasi layanan informasi dan pengaduan ALIANSI serta layanan paspor keliling antar kabupaten, serta Kantor Imigrasi Sampit dengan inovasi pelayanan drive-thru dan layanan antar paspor. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada ketersediaan data sekunder yang relevan di laman resmi masing-masing unit pelayanan maupun berita daring yang dapat diverifikasi.

Data yang digunakan dalam penelitian ini seluruhnya berupa data sekunder yang diperoleh dari berbagai situs web resmi, publikasi pemerintah, laporan tahunan Direktorat Jenderal Imigrasi, artikel berita kredibel, serta regulasi terkait pengelolaan BMN seperti Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara. Data sekunder tersebut mencakup informasi tentang kondisi fisik dan administratif BMN, sistem inventarisasi, kebijakan pemanfaatan aset, hingga dukungan BMN terhadap inovasi pelayanan yang telah dilaksanakan. Pemanfaatan data sekunder memungkinkan penelitian ini memotret fenomena aktual tanpa harus melakukan pengumpulan data primer yang memerlukan waktu dan biaya besar.

Proses analisis data dilakukan secara bertahap melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi informasi yang relevan dengan fokus penelitian, yakni pengelolaan BMN dan kaitannya dengan inovasi pelayanan keimigrasian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif yang menggambarkan masing-masing kasus secara tematis agar memudahkan pembaca memahami hubungan antara pengelolaan BMN dan inovasi layanan. Setelah itu, dilakukan penarikan kesimpulan dengan menginterpretasi pola-pola, kecenderungan, dan kesamaan maupun perbedaan antarunit layanan keimigrasian.

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Data yang diperoleh dari situs web resmi dibandingkan dengan artikel berita kredibel serta regulasi yang berlaku untuk memastikan konsistensi informasi. Selain itu, dilakukan juga evaluasi kredibilitas sumber dengan memprioritaskan data yang diterbitkan oleh instansi pemerintah atau media yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan temuan yang akurat, objektif, dan

komprehensif mengenai tantangan serta peluang pengelolaan BMN dalam mendukung inovasi pelayanan keimigrasian, serta memberikan rekomendasi yang dapat digunakan oleh pengambil kebijakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kajian menunjukkan bahwa pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan keimigrasian telah memasuki fase perbaikan secara bertahap seiring dengan tuntutan reformasi birokrasi dan meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap layanan publik. Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai salah satu unit eselon I di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki tanggung jawab strategis dalam memberikan pelayanan keimigrasian yang cepat, transparan, nyaman, dan ramah hak asasi manusia. Dalam kerangka tersebut, BMN berperan penting sebagai sarana, prasarana, dan infrastruktur yang menopang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi keimigrasian. Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan masih adanya kesenjangan antara kondisi ideal dan praktik aktual pengelolaan BMN, yang berimplikasi langsung pada kualitas inovasi pelayanan keimigrasian.

Secara nasional, data administrasi BMN di lingkungan keimigrasian kerap belum mencerminkan kondisi fisik nyata. Hal ini tampak dari beberapa laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menemukan ketidaksesuaian antara catatan administratif dan keadaan sesungguhnya, terutama pada aset tak berwujud (ATB) seperti sistem teknologi informasi atau perangkat lunak pendukung layanan keimigrasian. Ketidaksesuaian ini berdampak pada kesulitan dalam perencanaan pemeliharaan dan pengadaan aset yang tepat sasaran, sehingga dapat menghambat inovasi pelayanan publik. Sebagai contoh, pembaruan data aset dan persediaan dokumen keimigrasian yang dilakukan Direktorat Jenderal Imigrasi pada tahun 2021 dilakukan setelah BPK menemukan adanya inkonsistensi data. Langkah tersebut positif, namun menunjukkan bahwa mekanisme pengendalian internal perlu diperkuat agar akurasi data dapat terjaga secara berkesinambungan.

Selain masalah data, kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengelola BMN di banyak kantor imigrasi masih terbatas, terutama dalam aspek teknis seperti pemanfaatan sistem informasi manajemen BMN dan digitalisasi aset. Padahal, pengelolaan BMN modern menuntut keterampilan dalam pengoperasian sistem informasi, pengamanan data digital, pelabelan aset, dan analisis kebutuhan. SDM yang tidak terlatih dengan baik akan kesulitan memanfaatkan aplikasi manajemen aset yang tersedia, sehingga potensi teknologi tidak dapat dimaksimalkan. Keterbatasan ini diperparah oleh fragmentasi organisasi dan lemahnya koordinasi lintas unit, yang menyebabkan duplikasi penggunaan aset, pemborosan sumber daya, dan konflik kepentingan antar unit.

Di sisi lain, keterbatasan anggaran untuk pemeliharaan dan pembaruan aset fisik menjadi hambatan nyata ketika fasilitas pelayanan mengalami kerusakan atau tidak lagi relevan dengan tuntutan zaman. Aset yang rusak atau ketinggalan teknologi akan menghambat layanan keimigrasian, misalnya mesin autogate yang tidak berfungsi optimal di bandara atau ruang pelayanan yang tidak ramah kelompok rentan. Situasi ini menuntut pengelolaan BMN yang lebih proaktif, baik dari sisi perencanaan, penganggaran, maupun pemeliharaan.

Meski tantangan tersebut nyata, terdapat pula berbagai praktik baik dan peluang strategis yang dapat menjadi pijakan transformasi pengelolaan BMN agar mendukung inovasi layanan keimigrasian. Di tingkat nasional, misalnya, penerapan kebijakan yang memungkinkan 52 kantor imigrasi menerbitkan paspor elektronik memperluas cakupan layanan berbasis teknologi dan mendorong efisiensi proses. Inovasi layanan di bandara

internasional Soekarno-Hatta seperti penggunaan corridor gate, mesin autogate, dan sistem pembayaran overstay berbasis perbankan juga menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi dapat mempercepat layanan jika didukung oleh infrastruktur yang memadai. Praktik baik lain adalah penandatanganan perjanjian penggunaan bersama BMN antara Kanwil Kemenkumham NTB, Ditjen Imigrasi, dan Ditjen Pemasarakatan yang memungkinkan aset digunakan lintas unit, sehingga mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi.

Contoh konkret penerapan pengelolaan BMN yang mendukung inovasi pelayanan dapat dilihat di Kantor Imigrasi Palu. Kantor ini mengembangkan aplikasi Maleo yang memungkinkan masyarakat mengecek status permohonan paspor melalui ponsel, serta meluncurkan layanan Siaga bagi pemohon dengan kondisi khusus yang dijemput atau dilayani langsung di lokasi. Inovasi ini hanya dapat berjalan dengan baik jika perangkat dan sistem pendukungnya tersedia dan terpelihara dengan baik. Selain itu, Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tengah aktif melakukan rekonsiliasi dan pemutakhiran data laporan keuangan dan BMN semester I 2025 yang mencakup satuan kerja di Palu. Upaya ini menunjukkan kesadaran akan pentingnya akurasi data dalam mendukung layanan publik.

Di Kupang, Kantor Imigrasi Kelas I TPI meluncurkan berbagai inovasi layanan seperti “paspor dari rumah ke rumah” dan program Eazy Passport yang mendatangi lokasi pemohon di wilayah terpencil seperti Pulau Sumba. Inovasi ini memperlihatkan bahwa model layanan jemput bola dapat meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan keimigrasian. Namun, agar layanan ini konsisten, perlu dukungan aset bergerak yang memadai seperti kendaraan operasional, perangkat mobile, dan sistem komunikasi yang andal. Pengelolaan BMN yang tepat akan memastikan keberlanjutan inovasi layanan semacam ini.

Di Sampit, Kantor Imigrasi memperluas jangkauan layanan melalui inisiatif Paspor Merdeka di pusat perbelanjaan Citimall agar masyarakat dapat mengurus paspor lebih dekat dengan tempat tinggalnya. Inovasi ini menunjukkan bahwa pemanfaatan aset luar kantor seperti unit layanan bergerak atau stan sementara dapat menjadi strategi inovatif dalam konteks lokal. Namun demikian, keberhasilan strategi ini sangat bergantung pada pengelolaan BMN yang fleksibel dan adaptif, sehingga aset dapat digunakan sesuai kebutuhan masyarakat.

Praktik-praktik di Palu, Kupang, dan Sampit menunjukkan bahwa kantor imigrasi di berbagai daerah mulai bergerak menuju integrasi antara pengelolaan BMN dan inovasi layanan. Sinergi antara digitalisasi sistem, layanan mobile atau jemput bola, dan pemanfaatan aset bersama antar unit perlu diperkuat agar tidak menyisakan “aset mati” (asset idle). Agar inovasi layanan seperti autogate, aplikasi permohonan paspor daring, layanan Siaga, dan stan layanan luar kantor dapat terus berkembang, pengelolaan BMN harus ditingkatkan menuju akurasi data, peningkatan kapasitas teknis SDM, alokasi anggaran pemeliharaan yang memadai, dan pembentukan kerangka koordinasi lintas unit yang formal dan berkelanjutan.

Selain itu, penguatan forum koordinasi seperti rapat koordinasi atau konsinyasi pengelolaan BMN dapat menjadi sarana penyamaan persepsi, pembaruan kebijakan teknis, dan peningkatan integritas pengelolaan aset. Forum semacam ini juga dapat digunakan untuk memperkenalkan praktik baik antar unit dan memperluas jejaring kerja sama, termasuk kemitraan publik-swasta (public-private partnership) untuk memanfaatkan aset negara secara lebih efektif. Misalnya, penggunaan gedung atau fasilitas swasta sebagai lokasi layanan paspor keliling atau pusat informasi imigrasi dapat mengurangi beban pengadaan aset baru sekaligus meningkatkan jangkauan layanan.

Dalam konteks regulasi, penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2024 tentang tata cara penggunaan aset negara dalam masa transisi pemerintahan memberikan peluang untuk memperbaiki alur perpindahan aset dan memastikan bahwa aset eksisting tetap digunakan secara optimal meskipun terjadi perubahan struktur organisasi. Regulasi ini penting agar pengelolaan BMN tetap konsisten dan tidak menimbulkan ketidakpastian dalam masa transisi.

Secara keseluruhan, hasil kajian ini menunjukkan bahwa pengelolaan BMN yang baik merupakan fondasi penting bagi inovasi pelayanan keimigrasian. Tantangan seperti kelemahan data, keterbatasan SDM, dan hambatan regulasi harus diatasi agar aset dapat mendukung layanan modern seperti autogate, corridor gate, dan layanan mendesak. Praktik baik seperti perjanjian penggunaan bersama, digitalisasi sistem, layanan jemput bola, dan forum koordinasi dapat menjadi pendorong transformasi aset menjadi motor inovasi pelayanan. Dengan pendekatan yang tepat yang mempertimbangkan karakteristik geografis, tingkat mobilitas masyarakat, dan infrastruktur daerah, inovasi layanan keimigrasian tidak hanya menjadi simbol modernisasi, melainkan juga menyentuh akses nyata masyarakat dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi imigrasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) merupakan fondasi yang sangat penting dalam mendukung inovasi pelayanan keimigrasian di Indonesia. Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai pelaksana layanan keimigrasian memiliki mandat strategis untuk menyediakan pelayanan yang cepat, transparan, ramah hak asasi manusia, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Dalam konteks tersebut, BMN tidak hanya berperan sebagai aset negara semata, tetapi juga sebagai instrumen penggerak modernisasi dan inovasi layanan publik.

Meskipun demikian, pengelolaan BMN di lingkungan keimigrasian masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut meliputi ketidaksesuaian antara data administratif dan kondisi fisik aset, keterbatasan anggaran untuk pemeliharaan dan pembaruan aset, keterbatasan kapasitas teknis SDM pengelola BMN, lemahnya koordinasi lintas unit, serta kompleksitas regulasi yang muncul pada masa transisi organisasi. Tantangan-tantangan ini berdampak langsung terhadap kemampuan institusi dalam menyediakan layanan keimigrasian yang modern, cepat, dan inklusif.

Di sisi lain, terdapat peluang strategis yang dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan pengelolaan BMN sehingga mampu mendukung inovasi layanan keimigrasian. Praktik baik seperti penerapan paspor elektronik di 52 kantor imigrasi, penggunaan teknologi autogate dan sistem pembayaran digital di bandara, pengembangan aplikasi layanan daring seperti Maleo di Palu, program Eazy Passport dan “paspor dari rumah ke rumah” di Kupang, serta Paspor Merdeka di Sampit, menunjukkan bahwa inovasi layanan publik dapat berjalan optimal bila ditopang pengelolaan BMN yang akurat, fleksibel, dan adaptif. Penandatanganan perjanjian penggunaan bersama BMN antar unit serta forum konsinyasi dan rapat koordinasi pengelolaan BMN juga menjadi contoh nyata strategi efisiensi dan efektivitas pemanfaatan aset negara.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa pengelolaan BMN yang terencana, transparan, dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis akan menjadi fondasi bagi pelayanan keimigrasian yang lebih modern, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Ke depan, peningkatan kapasitas teknis SDM, penguatan sistem informasi manajemen aset, pengalokasian anggaran pemeliharaan yang memadai, serta pembentukan kerangka koordinasi lintas unit yang formal dan berkelanjutan menjadi

langkah penting untuk memastikan bahwa setiap inovasi layanan keimigrasian didukung oleh infrastruktur dan aset negara yang memadai. Dengan langkah tersebut, transformasi pelayanan keimigrasian di Indonesia tidak hanya menjadi wacana, tetapi juga terwujud secara nyata dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2021, 21 Desember). *Imigrasi perbarui data aset barang milik negara hingga persediaan dokumen keimigrasian*. Diakses dari <https://www.imigrasi.go.id/berita/2021/12/21/imigrasi-perbarui-data-aset-barang-milik-negara-hingga-persediaan-dokumen-keimigrasian>
- Detik News. (2024, 8 Juli). *Menteri Imipas tinjau sejumlah inovasi pelayanan imigrasi bandara Soetta*. Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-8027910/menteri-imipas-tinjau-sejumlah-inovasi-pelayanan-imigrasi-bandara-soetta>
- Direktorat Jenderal Imigrasi. (2020, 2 November). *Pembuatan paspor imigrasi Kupang layani dari rumah ke rumah*. Diakses dari <https://www.imigrasi.go.id/berita/2020/11/02/pembuatan-paspor-imigrasi-kupang-layani-dari-rumah-ke-rumah>
- Direktorat Jenderal Imigrasi. (2022, 1 Januari). *Ini daftar 52 kantor imigrasi yang bisa terbitkan paspor elektronik*. Diakses dari <https://www.imigrasi.go.id/berita/2022/01/24/ini-daftar-52-kantor-imigrasi-yang-bisa-terbitkan-paspor-elektronik>
- DJKN Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Penataan pengelolaan Barang Milik Negara*. Diakses dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/2330/penataan-pengelolaan-barang-milik-negara-bmn.html>
- Instagram Kantor Imigrasi Sampit. (2025, 5 Februari). *Paspor Merdeka di Citimall Sampit*. Diakses dari <https://www.instagram.com/reel/DNpCIcgNyHz/>
- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat. (2024, 30 Juli). *Kakanwil Kemenkum NTB teken perjanjian penggunaan BMN dengan Ditjen Pemasayarakatan dan Ditjen Imigrasi*. Diakses dari <https://ntb.kemenkum.go.id/berita-utama/kakanwil-kemenkum-ntb-teken-perjanjian-penggunaan-bmn-dengan-ditjen-pemasyarakatan-dan-ditjen-imigrasi>
- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah. (2025, 10 Juli). *Kemenkum Sulteng siap sukseskan rekonsiliasi dan pemutakhiran laporan keuangan dan BMN semester I tahun 2025*. Diakses dari <https://sulteng.kemenkum.go.id/berita-utama/kemenkum-sulteng-siap-sukseskan-rekonsiliasi-dan-pemutakhiran-laporan-keuangan-dan-bmn-semester-i-tahun-2025>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024, 15 Juni). *Pengelolaan Barang Milik Negara di masa transisi pemerintahan tahun 2024*. Diakses dari <https://bppk.kemenkeu.go.id/balai-diklat-keuangan-balikpapan/artikel/pengelolaan-barang-milik-negara-di-masa-transisi-pemerintahan-tahun-2024-979424>
- Kompasiana. (2025, 7 Januari). *Sinergi tiga instansi optimalisasi aset negara untuk pelayanan publik*. Diakses dari <https://www.kompasiana.com/gardaterdepanhumas1432/67a0b54834777c4aac6f7972/sinergi-tiga-instansi-optimalisasi-aset-negara-untuk-pelayanan-publik>
- Ombudsman Republik Indonesia. (2024). *Ombudsman RI gelar rakor pengelolaan BMN dan rumah tangga*. Diakses dari <https://ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-ri-gelar-rakor-pengelolaan-bmn-dan-rumah-tangga>
- ResearchGate. (2023). *Optimalisasi Pengelolaan BMN dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan pada UIN Sumatera Utara Medan*. Diakses dari https://www.researchgate.net/publication/371203676_Optimalisasi_Pengelolaan_BMN_Dalam_Meningkatkan_Kualitas_Pelayanan_Pada_UIN_Sumatera_Utara_Medan
- Timex Kupang. (2024, 30 November). *Imigrasi Kupang luncurkan maskot dan inovasi terbaru untuk memaksimalkan pelayanan publik*. Diakses dari <https://timexkupang.fajar.co.id/2024/11/30/imigrasi-kupang-luncurkan-maskot-dan-inovasi->

[terbaru-untuk-maksimalkan-pelayanan-publik](#)

- Antara Sulteng. (2023, 10 Agustus). *Imigrasi Palu dorong digitalisasi layanan lewat aplikasi Maleo*. Diakses dari <https://sulteng.antaranews.com/berita/258861/imigrasi-palu-dorong-digitalisasi-layanan-lewat-aplikasi-maleo>
- Amiri, K. (2016). *Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)*. Jurnal Potret Pemikiran, Vol. 20, No. 2.
- Wilonotomo, W. (2018). Inovasi teknologi pada pelayanan keimigrasian. Jurnal Ilmiah Keimigrasian Politeknik Imigrasi.
- “Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)” (2024). Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran, Vol. 7, No. 3.
- Firmansyah, A. (2021). Bagaimana kualitas pengelolaan Barang Milik Negara: pengaruh sistem informasi, kompetensi pegawai, komitmen organisasi. Jurnal Manajemen Saburai.
- Inovasi Administratif dalam Pelayanan Keimigrasian (2025). Jurnal STIAY Appim Makassar.
- Fitri & Paselle. (2022). *Inovasi Pelayanan Keimigrasian melalui Program Eazy Passport di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Nunukan*. eJournal Administrasi Publik.
- Kustiani, I. (-). *Inovasi Pelayanan Prima Paspor Online di Kota Malang*. (PDF).
- “Analisis penerapan penatausahaan barang milik negara” (2025). Jurnal Rapi.
- Rumondang, R. (2024). *Kajian Yuridis Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) terhadap Pemanfaatan Aset Tanah BUMN pada PT Kereta Api*. Jurnal Media Akademik.
- Pangestu, W. R. (-). *Inovasi pelayanan One Stop Service (SPPT / OSS) di Kantor Imigrasi Surabaya*. Universitas Airlangga.
- Hamdi, H. (2015). *Penetapan status penggunaan Barang Milik Negara dalam rangka optimalisasi penerimaan negara*. Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, 9(4).
- Nur Izzaturrahmah & Saputro, E. (2024). *Inovasi Pelayanan Eazy Passport oleh Direktorat Jenderal Imigrasi*. Jurnal Administrasi dan Inovasi Manajemen Publik.
- Purwastuti, G. A. D. (2020). *Pelayanan Publik Keimigrasian berbasis good governance*. Jurnal Ilmu Pemerintahan & Kebijakan Publik.
- Konsep Pengawasan Tata Kelola Barang Milik Negara (-). Jurnal Internasional (JGI).
- “Inovasi Pelayanan Publik melalui Aplikasi M-Paspor” (2023). E-Jurnal Universitas Sanisan.
- Rusman, R. (2017). *Pengaruh Penatausahaan Barang Milik Negara terhadap kualitas pelayanan publik di Aceh*. Jurnal Simen.